

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan yang baik, pemerintah Indonesia akan selalu meningkatkan berbagai bidang demi terciptanya penyelenggaraan pelayanan yang transparan dan akuntabel, khususnya pengelolaan keuangan negara. Pelaku pengelolaan keuangan akan melakukan penyempurnaan aturan akuntansi pemerintah dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang disingkat dengan SAP yang berfungsi menyediakan penyajian serta susunan atas laporan dari keuangan bagi pemerintah daerah.

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 2005 merupakan bagian dari tiga lampiran utama, antara lain Lampiran pertama berisi Standar Akuntansi Pemerintahan Berdasarkan Kas terhadap Akrual, Lampiran kedua berisi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Lampiran 3 berisi tentang Pelaksanaan Penyusunan Akuntansi Pemerintahan Standar Berbasis Akrual". (KeuLSM:2013).

Aturan baru dari Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 jika dilakukan perbandingan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 ialah kewenangan entitas akuntansi dan entitas pelapor. Entitas akuntansi dari penjelasan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ialah instrumen pemerintah bertindak pelaksana kegiatan keuangan sebagai pelaksanaan aktivitas akuntansi serta penyajian laporan keuangan atas dasar akuntansi. Entitas pelapor adalah pemerintah yang terdiri dari satu bahkan

melebihi dari entitas akuntansi berdasarkan putusan yang diwajibkan untuk melaporkan data laporan keuangan, mengutip Halim dkk: 2012.

Keterbukaan tanggung jawab suatu laporan keuangan pada pemerintahan atau perusahaan diakui masalah yang sangat *urgent* terutama seperti penyelenggaraan pemerintahan yang terlihat dan diawasi oleh umum. Tidak hanya itu pemerintahan wajib memberikan tanggung jawab suatu laporan keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Program layanan kesehatan tanpa bayar merupakan inovasi pemerintah yang secara langsung terasa kepada masyarakat. Hal ini diikuti dengan peningkatan fasilitas pelayanan dari pemerintah, antara lain rumah sakit, puskesmas (induk dan pembantu). Sebagai pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik tanpa mencari keuntungan atau profit, puskesmas terus meningkatkan fasilitas dan pelayanannya. Organisasi pelayanan publik tanpa keuntungan atau laba merupakan organisasi yang memberi pelayanan kesehatan berdasarkan pada penerapan pendapatan retribusi daerah tersebut. Pembayaran pelayanan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan untuk operasional organisasi tersebut dapat berjalan dan dapat memberikan pendapatan bagi daerah. Meskipun yang sudah terjadi saat ini untuk peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berobat akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat secara gratis.

Puskesmas merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang berpusat pada pembangunan kesehatan masyarakat yang mempunyai aktifitas rutin serta banyaknya inovasi-inovasi layanan serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang komprehensif.

Puskesmas mempunyai wilayah kerja terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan. Dalam menentukan suatu wilayah kerja puskesmas untuk pembagiannya meliputi dari kepadatan warga sekitar, kondisi alam, lebar wilayah serta kondisi infrastruktur. Sasaran penduduk dari tiap satu wilayah kerja puskesmas kebanyakan bisa diratakan kurang lebih tiga puluh ribu warga. Puskesmas sebagai penyelenggara layanan kesehatan masyarakat sangat butuh untuk didukung dengan standar operasional pemberian layanan kesehatan yang sekarang masih sangat minim layaknya puskesmas sebagai pembantu serta layanan kesehatan puskesmas keliling. Minimal terdiri dari layanan pengobatan (kuratif), tindakan preventif (pencegahan), peningkatan kesehatan (promotif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dan inovasi Puskesmas yang menysasar seluruh warga dan tidak membeda-bedakan baik jenis kelamin maupun kelompok umur, dari usia masih dalam batas rahim sampai mati.

Terdapat beberapa manfaat puskesmas untuk masyarakat diantaranya :

- a. Penyelenggaran pendirian macam-macam kegiatan kesehatan pada ruang lingkup daerah.
- b. Diberikannya penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi kepada masyarakat guna mensejahterahkan pentingnya kesehatan.
- c. Adanya penyelegaraan layanan kesehatan secara menyeluruh.

Puskesmas Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo merupakan puskesmas utama yang ada di Kecamatan Krian. Penulis memutuskan untuk mengkaji puskesmas tersebut bertujuan guna menganalisa laporan keuangan Puskesmas Barengkrajan Kabupaten Sidoarjo sebab mempunyai rawat penginapan pasien umum atau BPJS dan juga rawat jalan. Menurut penulis, sangat tertarik dengan permasalahan ini

jika diketahui lebih jauh tentang sajian laporan keuangan yang tidak sama dengan puskesmas lainnya sebab Puskesmas Barengkrajan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Puskesmas yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan daerah secara penuh. Badan Layanan Umum (BLUD) pada tahun 2014.

Badan Layanan Umum Daerah ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau distilahkan dengan SKPD yang menyediakan layanan umum baik berwujud jasa maupun pengadaan barang dengan mendasari prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD ialah bagian dari pemerintah daerah, yang aturan hukumnya legal yang membedakan hanya pelaksanaan keuangan lebih fleksibel guna menjalankan kegiatan usaha serta promosi guna mengoptimalkan layanan di masyarakat sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penyajian laporan keuangan Puskesmas Barengkrajan Kabupaten Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan pedoman SAP ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui apakah penyajian laporan keuangan Puskesmas Barengkrajan Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 .

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademis

Penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan pembendaharaan bacaan ilmiah mengenai analisis laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman yang berharga dalam memperbanyak ilmu sudah didapatkan diperkuliahan, dan juga diharapkan bisa menjadi pelaksanaan dalam kerja praktek di lapangan.

3. Aspek Praktis

Penelitian yang bermanfaat untuk memperbanyak informasi-informasi bagi yang berkepentingan dalam menyajikan suatu data keuangan yang menerapkan dasar SAP.

Hasil daripada kajian yang diteliti dimohon mampu untuk memperbanyak daftar pustaka yang ada serta sebagai masukan bagi yang tertarik guna belajar menganalisa evaluasi penyajian laporan keuangan sesuai SAP.